

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *"The Theory of Planned Behavior." Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323–338.
- Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh*
- Arham, M.I. 2020. *Analisis Perencanaan Pajak Intuk PPh Pasal 21 pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Tuminting. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.*
- Darussalam, D. (2017). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan. Jakarta: Visimedia.*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *PMK No.168/PMK.03/2023 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.*
- Efektivitas Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.*
- Efektivitas Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 123–130.
- Handayani, R. (2022). *Evaluasi Penerapan Pemotongan PPh 21 atas Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Akuntansi dan Administrasi*, 12(1),
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Hidayat, M. T. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.*
- Jakarta: Salemba Empat. lanoputri,*

- Jaya Mandiri Tulungagung. BENEFIT, 7(2), 74–93.*
- Jurnal Administrasi Publik, 10(3), 123–130.*
- Kartini, H. S. (2019). *Perpajakan Indonesia Peraturan yang memberikan petunjuk teknis mengenai cara pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21.*
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour. Cambridge University Press.*
- Lubis, A. (2021). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak di Sektor Swasta. Jurnal*
- Mardiasmo (2020),). *Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal*
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.*
- Minarni, E. (2020). *Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak pada CV. Adita*
- Nurhaliza, D., & Hidayat, T. (2021). *Kepatuhan Perpajakan Instansi Pemerintah terhadap Pelaporan PPh 21. Jurnal Ilmu Administrasi Fiskal, 5(2), 67– Pajak Penghasilan Berbasis Web Dengan Metode Gross Up. REMIK: Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai, dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo I. Perpajakan: Teori dan kasus.*
- Nurlis, N. (2010). *"Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak." Jurnal Ilmu Administrasi, 7(1), 22–35.*
- Nurlis, N. (2010). *"Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak." Jurnal Ilmu Administrasi, 7(1), 22–35.*
- Pajak dan Keuangan Publik, 13(1), 45–58.*
- Pelaporan Wajib Pajak. Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 5(1), 13–25. Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika*

Pelayanan yang Diterima oleh Masyarakat sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah yang Diatur Dalam Sains.

PER-16/PJ/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

PER16/PJ/2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21.

Prasetyo, T. H., & Supriyadi, E. (2020). *Analisis Perbedaan Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 pada Sektor Swasta dan Pemerintah. Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15(2), 89–98.

PMK No. 168/PMK.03/2023

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Graha Ilmu.*

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Graha Ilmu.*

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aspek Formal. Bandung:*

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan konsep dan aspek formal. Bandung: Rekayasa*

Ramadhani, E. N., & Giffary, M. K. (2021). *Perancangan Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.*

- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan*
- Sari, D. (2019). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*.
- Saad, N. (2014). *Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075
- Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2020). *Perpajakan Indonesia. Tingkat Kepatuhan Pajak pada Sektor Swasta: Studi Empiris pada Karyawan Perusahaan Jasa*. *Jurnal Pajak dan Akuntansi Indonesia*, 9(2), 72–83.
- UI. *Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah*. *Cepalo*, 4(2), 143–156.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Wahidah, N. (2021). “*Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan*”,
- Wibowo, A., & Lestari, F. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad*